

PROPOSAL PENELITIAN
Pengembangan model Kebijakan Mewujudkan
Singaraja Sebagai Kota Pendidikan



KERJASAMA
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN BULELENG
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
TAHUN 2024

Daftar Isi

DAFTAR ISI	1
LEMBAR PENGESAHAN	2
PENDAHULUAN	
A. Ruang Lingkup Kegiatan	3
B. Sasaran/Output	7
C. Spesifikasi Teknis	8
METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN	
A. Sifat Penelitian	9
B. Metode Pengumpulan Data	11
C. Metode Pengolahan dan Analisis Data	11
RENCANA PENGGUNAAN PERSONIL	13
RENCANA JADWAL PELAKSAAN	14
A. Rencana Kegiatan	14
B. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	15
MITIGASI RESIKO, MONITORING DAN EVALUASI	16
A. Identifikasi dan Penangan Resiko	16
B. Monitoring dan Evaluasi	17
PELAPORAN	19
PENUTUP	20
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Daftar Lampiran	
Lampiran 1. Rencana Anggaran Biaya	21
Lampiran 2. Daftar Pustaka	23

LEMBAR PENGESAHAN

Paket Pengadaan Swaklola	:	Pengembangan Model Kebijakan Mewujudkan Singaraja Sebagai Kota Pendidikan
Instansi Penanggungjawab Anggaran	:	Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
Tahun Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan	:	Tahun 2024
Sasaran/Output	:	Kajian Pengembangan Model Kebijakan Mewujudkan Singaraja Sebagai Kota Pendidikan
Jangka Waktu Pekerjaan	:	5 (lima) bulan kalender
Rencana Anggaran Biaya	:	Rp. 112.925.000,- (Seratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
Pelaksana Pekerjaan Nama Organisasi	:	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pendidikan Ganesha
Nomor Pengesahan Badan Hukum Bidang Kegiatan	:	
Alamat Korespondensi	:	Jalan Udayana No. 11 Singaraja-Bali

Singaraja, 20 Mei 2024

Kepala LPPM

Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si.

NIP. 196507111990031003

Ketua Peneliti

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a final flourish, positioned above the name of the researcher.

Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd.

NIP. 198007202006041001

PENDAHULUAN

A. Ruang Lingkup Kegiatan

Saat ini Indonesia tengah berjuang keras dalam meningkatkan mutu pendidikan nasionalnya yang sedang mengalami keterbelakangan dalam berbagai dimensi. Menurut catatan *Human Development Report* Tahun 2022 versi UNDP, peringkat HDI (*Human Development Index*) atau kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia berada di urutan 111 dari 189 negara yang ada di dunia dan berada di peringkat 6 ASEAN. Baik di ASEAN maupun di dunia, Indonesia ada di peringkat tengah. Pada kawasan Asia Tenggara dalam hal IPM (ideks pembangunan manusia) Indonesia masih tertinggal dari Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Jika dibandingkan dengan Singapura, Brunei, dan Malaysia, untuk keempat indikator yang diukur tadi Indonesia tertinggal. Sementara jika dibandingkan dengan Thailand, Indonesia unggul dalam lama waktu RLS (rata-rata lama sekolah). Indonesia hampir unggul dalam semua aspek dibanding Filipina kecuali dalam hal rata-rata lama waktu mengenyam pendidikan. Hal ini menunjukkan kondisi pendidikan Indonesia masih mengalami berbagai permasalahan bertalian dengan peningkatan kuatitas dan kuantitasnya.

Permasalahan pendidikan merupakan salah satu implikasi dari sistem pemerintahan yang sentralistik, hingga tahun 1999. Implikasinya, daerah hampir tidak berperan dalam pengelolaan pendidikan. Hampir semua instrumen pendidikan telah dibuat dan dipatok dari pusat, dimana daerah hanya sebagai pelaksana saja. Sementara itu, pendidikan diharapkan mampu melestarikan dan mengembangkan budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, di mana pendidikan itu dilangsungkan (Tilaar, 2005; Setyaningsih, K., 2017). Model sentralisasi yang pernah dilaksanakan di Indonesia telah menghadirkan seperangkat permasalahan bagi bangsa dan kehidupan masyarakat luas. Mulai tahun 1999, bangsa Indonesia melakukan inovasi dalam penataan dan pelaksanaan sistim kenegaraan, termasuk pada sektor pendidikan. Inovasi yang dimaksud adalah dengan dilaksanakannya desentralisasi penuh, kecuali untuk bidang hubungan luar negeri, pertahanan keamanan, dan moneter (UU No. 23 Tahun 2014). Pemberian kewenangan yang otonom kepada daerah, khususnya daerah kabupaten sebagai ujung tombak pelaksana otonomi, telah menghadirkan tantangan dan sekaligus peluang bagi setiap daerah dan bangsa secara keseluruhan dalam membangun diri dan lingkungannya, termasuk untuk sektor pendidikan. Penerapan otonomi pendidikan dengan sentral pemerintah kabupaten, telah membawa warna tersendiri bagi perumusan kebijakan dan praktek-praktek pendidikan (Djalal, 2004). Upaya pembenahan terhadap berbagai kelemahan dan permasalahan yang selama ini melekat pada sektor pendidikan, diharapkan dapat terjawab secara tuntas melalui penerapan

otonomi pendidikan dan pemberlakuan manajemen berbasis sekolah yang diiringi dengan inovasi pada kurikulum pendidikan nasional.

Desentralisasi pendidikan merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tetap bertumpu pada standar nasional. Hal ini semakin diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang diubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 ditentukan bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga pemerataan pendidikan pada setiap daerah dapat tercapai. Ketentuan ini membuktikan bahwa selama ini ada beberapa daerah yang masih belum tersentuh secara optimal oleh berbagai kebijakan pendidikan yang diambil oleh pemerintah. Untuk itu, dalam era reformasi ini diberlakukanlah otonomi daerah dan otonomi pendidikan. Otonomi pendidikan merupakan bagian integral dari otonomi daerah, di mana sekolah bersama-sama dengan pemerintah daerah dapat mengembangkan pendidikan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat dan kemampuan serta potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Pelaksanaan otonomi pendidikan, juga berimplikasi pada model dan praktek pengelolaan pendidikan pada level daerah, dimana kabupaten diberikan tugas dan tanggungjawab untuk ikut memajukan pendidikan di daerahnya masing-masing secara sinergis-mutualis (Suti, M., 2011). Hal ini bertujuan untuk lebih mendekatkan pendidikan pada kepentingan riil masyarakat dan mempercepat proses kemajuan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Berbagai kebijakan yang telah, sedang, dan akan diambil oleh pemerintah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan nasional, ternyata tidak jarang justru melahirkan permasalahan baru yang jauh lebih rumit dan kompleks (Hasan, 2002; Nasution, E., 2016). Hal ini merupakan sesuatu yang harus dipikirkan dan ditindaklanjuti oleh berbagai komponen masyarakat, jika tidak ingin mutu pendidikan Indonesia semakin melemah. Konsep di atas, sejalan dengan apa yang dikedepankan oleh World Bank (2001) dalam Laporan Tahunannya tentang kondisi dan mutu pendidikan negara-negara berkembang di kawasan Asia-Fasifik, bahwa salah satu factor penentu keberhasilan sebuah negara dalam membangun bangsanya lewat sektor pendidikan adalah pada manajemen dan evaluasi kebijakan publik, dimana kedua hal itu, saat ini di Indonesia belum begitu populer di kalangan birokrat pendidikan (Nuryanta, N., 2008). Pembangunan pendidikan, logikanya senantiasa membumi, sehingga tidak terlepas dari akar budaya masyarakat sebagai

medium pendidikan itu sendiri (Soekamto, 1988). Pembangunan pendidikan Indonesia harus diarahkan pada upaya peningkatan mutu dan pembumian dari proses dan hasil pendidikan itu sendiri. Dalam konteks ini, pemerintah daerah (kabupaten) memiliki kesempatan yang luas untuk membangun pendidikan di daerahnya yang berwawasan lokal dan berstandar nasional untuk dapat mengadaptasi budaya dan tradisi yang ada di daerahnya masing-masing. Upaya dari pemerintah pusat dalam memberikan desentralisasi pendidikan dimanfaatkan secara maksimal oleh daerah dengan melakukan berbagai usaha untuk menjadikan daerahnya sebagai pelopor dalam pembaharuan dan peningkatan kualitas mutu pendidikan (Mukhsin, M., 2019). Mengingat pendidikan memegang peranan penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang akan membantu perkembangan perekonomian daerah sehingga dapat memajukan daerah. Salah satu kabupaten yang memberi perhatian khusus terhadap pendidikan adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Sebagai kabupaten yang terdapat di belahan Bali Utara dan merupakan pusat Pemerintahan Bali-Lombok pada jaman Kolonial dan pusat Pemerintahan Sunda Kecil di awal kemerdekaan. Buleleng merupakan wilayah yang representatif untuk menjadikan diri sebagai Kota Pendidikan. Selain wilayahnya yang mudah dijangkau dari semua Kabupaten/Kota yang ada di Bali karena berbatasan dengan dengan Kabupaten Karangasem, Bangli, Badung, Tabanan dan Negara, juga didukung oleh wilayah perairan yang mudah dijangkau dari pulau lain yang ada disekitarnya, seperti Jawa dan Lombok. Secara historis sebagai pusat pemerintahan menggambarkan bahwa Kota Singaraja di masa lampau pernah menjadi pusat pendidikan di Bali. Namun dengan dipindahkannya pusat pemerintahan provinsi ke kota Denpasar, maka semua perangkat daerah juga dipindahkan ke kota Denpasar. Di sisi lain Kota Singaraja telah banyak melahirkan akademisi dan pakar yang kompeten dalam berbagai bidang ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Singaraja adalah kota yang mendukung proses perkembangan intelektual dan tempat yang kondusif bagi pelajar dalam mengukir prestasi. Bahkan Kota Singaraja dijadikan sebagai salah satu kota pilihan untuk melanjutkan pendidikan oleh masyarakat di luar wilayah Kabupaten Buleleng. Ada beberapa hal yang dijadikan bahan pertimbangan memilih Kota Singaraja sebagai tempat melanjutkan pendidikan : (1) mudah dijangkau oleh sarana transportasi, (2) terdapat banyak pilihan sekolah (SMA, SMK, dan perguruan tinggi), (3) praktek pendidikannya dinilai lebih berkualitas (4) fasilitas pendidikan lebih menunjang dan lebih terjangkau (buku, alat tulis, tempat kursus, tempat foto copy, rental komputer, toko elektronik, dan sarana prasarana lainnya), (5) biaya hidup lebih murah, (6) terdapat berbagai macam tempat rekreasi, (7) terdapat banyak akademisi yang tinggal di Kota Singaraja, dan (8) Buleleng

termasuk masyarakat yang sedang berkembang dan sangat bersahabat dengan pendatang. Dari beberapa pertimbangan tersebut, tampaknya tidak berlebihan, jika sebagian besar pelajar menjatuhkan pilihannya pada Kota Singaraja sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan.

Masyarakat Kota Singaraja yang sebagian besar merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja dalam berbagai sektor, seperti guru, pegawai Pemda, dosen, polisi, bidan, dokter, sampai dengan pejabat politik (DPRD, DPR dan Bupati) dan sebagian kecil sebagai petani, tenaga harian dan pengusaha merupakan masyarakat yang sedang berkembang. Sebagai masyarakat berkembang Kota Singaraja sangat membutuhkan sekolah-sekolah yang dapat menunjang proses kemajuannya. Selain membutuhkan sekolah, Kota Singaraja juga dapat menjadi ajang bagi pelajar untuk menempa ilmu, mengingat masyarakatnya yang reaktif dan akomodatif terhadap perkembangan IPTEKS yang terjadi. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai pemegang *polecy* di kabupaten sangat mendukung terjadinya performansi pendidikan di daerahnya. Hal ini ditunjukkan dengan dikembangkannya sekolah-sekolah unggul pada setiap jenjang pendidikan dengan menggandeng dunia industri, dunia usaha serta perguruan tinggi. Pengembangan sekolah-sekolah unggul adalah usaha untuk memelihara, melestarikan dan mengembangkan IPTEKS, budaya masyarakat Bali sebagai upaya serta realisasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Selain itu pengembangan sekolah unggul merupakan strategi Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang siap bersaing dalam meraih peluang kerja serta menghadapi pasar bebas dan globalisasi. Pengembangan sekolah unggul dengan menggandeng dunia industri, dunia usaha dan perguruan tinggi ini bertujuan untuk mengembangkan *center of excellence* di Kota Singaraja. Pengembangan sekolah ini diikuti dengan dibangunnya berbagai sarana dan prasarana yang mendukung proses pendidikan, seperti (1) gedung sekolah, (2) penambahan buku pedoman, (3) penambahan pengangkatan tenaga pengajar, (4) peningkatan mutu tenaga pengajar, (5) pemberian *reinforcement* pada pelajar dan guru berprestasi, (6) meningkatkan praserta masyarakat dalam pendidikan, (7) pengembangan perpustakaan digital, (8) digitalisasi pendidikan, dan (9) mengadakan berbagai kegiatan akademis yang menunjang proses pendidikan. Walaupun semuanya itu belum mampu menggerakkan secara keseluruhan aspek pengembangan pendidikan dan kota pendidikan di Singaraja.

Secara umum, untuk dapat menyandang gelar sebagai Kota Pendidikan ada beberapa syarat yang harus melekat pada Kota tersebut, seperti ; (1) ada sekolah yang memadai dengan kualitas yang unggul pada berbagai jenjang, (2) sebagian besar penghuninya bergelut dalam

bidang pendidikan, (3) fasilitas pendidikan yang memadai, (4) masyarakatnya peduli dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendidikan, dan (5) adanya keberpihakan pemerintah dalam bentuk kebijakan untuk memprioritaskan masalah pendidikan (Dantes, dalam Forum diskusi 2004; Maftuhin, A., 2017). Untuk dapat memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan di atas, diperlukan berbagai upaya dari pemerintah, lembaga seadaya masyarakat (LSM), praktisi dan masyarakat untuk mewujudkannya. Semua komponen ini mesti saling bersinergi dalam menunjang terwujudnya Kota Pendidikan di Kota Singaraja. Harapan Kota Singaraja untuk dapat menyandang gelar sebagai Kota Pendidikan tidak berlebihan, mengingat beberapa komponen yang disyaratkan telah terpenuhi, bahkan berbagai usaha untuk merealisainya telah dan sedang dilakukan oleh Pemkab Buleleng. Namun harapan dan usaha untuk menjadikan Kota Singaraja sebagai Kota Pendidikan sampai saat ini belum dapat terwujud. Diperlukan kajian strategis yang menjadi arah pengembangan kota pendidikan dan pedoman umum yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, sehingga tepat sasaran. Berdasarkan kondisi tersebut, maka ruang lingkup pekerjaan ini adalah bertalian dengan (1) memformulasi kondisi eksisting pendidikan di Kota Singaraja, (2) menganalisis kondisi dan masalah pendidikan di Kota Singaraja, (3) memformulasi konsep model kota pendidikan di Kota Singaraja, dan (3) memformulasi model kebijakan mewujudkan Kota Singaraja sebagai Kota Pendidikan.

B. Sasaran/Output

Sasaran kegiatan ini adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Buleleng, Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng, Komisi IV DPRD Kabupaten Buleleng yang membidangi Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Perguruan Tinggi yang ada di Kota Singaraja, SMA, SMK dan MA, SMP dan MTs, SD dan MI, PAUD, akademisi, guru, pengamat pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, pengusaha bidang pendidikan, pengurus yayasan, mahasiswa, siswa dan orang tua siswa/mahasiswa. Formulasi informasi dari sasaran kegiatan penelitian ini berupa formulasi kondisi eksisting kebijakan pendidikan di Kota Singaraja, masalah-masalah pendidikan di Kota Singaraja, konsep model Kota Pendidikan di Kota Singaraja dan model kebijakan mewujudkan Kota Singaraja sebagai Kota Pendidikan. Adapun output kegiatan ini adalah: (1) laporan pendahuluan, (2) laporan akhir, (3) ringkasan eksekutif dan (4) naskah jurnal ilmiah.

C. Spesifikasi Tenis

Memastikan output kegiatan dapat tercapai dengan baik kegiatan akan dilakukan dengan tahapan persiapan yang menyangkut kelengkapan administrasi, pengajuan proposal kegiatan, pengajuan pendanaan kegiatan, dan menyepakati komponen-komponen sebagaimana tertera dalam kerangka acuan kerja. Kemudian pelaksanaan kegiatan yang dilalui dengan pengembangan instrument penelitian, pengambilan data penelitian, analisi data penelitian dan focus group discussion. Tahap berikutnya adalah pelaporan kegiatan yang dilalui dengan penyajian hasil kegiatan penelitian dan penyampaian produk penelitian.

METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Sifat Penelitian

Berdasarkan fokus masalah penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini secara metodologis menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (*mixed methods*) dalam paradigma kebijakan publik (Sugiyono, 2010). Rasional pemilihan desain dan pendekatan tersebut karena untuk menggali dan melakukan pengembangan model kebijakan mewujudkan Singaraja sebagai Kota Pendidikan yang dibutuhkan adalah setting alamiah piranti-piranti pendidikan, proses pendidikan, fasilitas pendidikan, kondisi sosial, budaya, ekonomi, kebutuhan pendidikan, kurikulum, dosen, guru, mahasiswa, siswa dan orang tua siswa serta mahasiswa dan kebijakan pendidikan Pemerintah Kabupaten Buleleng (Spradley, J., 1980). Informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa kelompok, yaitu: (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, (2) Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Buleleng, (3) Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng, (4) Komisi IV DPRD Kabupaten Buleleng yang membidangi Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, (5) Perguruan Tinggi yang ada di Kota Singaraja, (6) SMA, SMK dan MA, SMP dan MTs, SD dan MI serta PAUD, (7) dosen dan guru, (8) pengamat pendidikan, (9) lembaga swadaya masyarakat, (10) pengusaha bidang pendidikan, (11) pengurus yayasan, (12) mahasiswa, siswa dan orang tua siswa/mahasiswa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Pertanyaan penelitian	Informan/Objek Penelitian
1.	Bagaimanakah kondisi eksisting pendidikan di Kota Singaraja?	<ul style="list-style-type: none">✓ Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;✓ Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Buleleng;✓ Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng;✓ Komisi IV DPRD Kabupaten Buleleng yang membidangi Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;✓ Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Buleleng;✓ SMA, SMK dan MA, SMP dan MTs, SD dan MI;✓ Dosen dan guru;✓ Pengamat pendidikan;✓ Lembaga swadaya masyarakat;✓ Pengusaha bidang pendidikan;✓ Pengurus yayasan,; dan✓ Mahasiswa, siswa dan orang tua siswa.

2.	Bagaimanakah kondisi dan masalah pendidikan di Kota Singaraja?	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng; ✓ Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Buleleng; ✓ Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng; ✓ Komisi IV DPRD Kabupaten Buleleng yang membidangi Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; ✓ Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Buleleng; ✓ SMA,SMK dan MA, SMP dan MTs, SD dan MI; ✓ Dosen dan guru; ✓ Pengamat pendidikan; ✓ Lembaga swadaya masyarakat; ✓ Pengusaha bidang pendidikan; ✓ Pengurus yayasan,; dan ✓ Mahasiswa, siswa dan orang tua siswa.
3.	Bagaimanakah formulasi konsep model kota pendidikan di Kota Singaraja?	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng; ✓ Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Buleleng; ✓ Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng; ✓ Komisi IV DPRD Kabupaten Buleleng yang membidangi Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; ✓ Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Buleleng; ✓ SMA,SMK dan MA, SMP dan MTs, SD dan MI; ✓ Dosen dan guru; ✓ Pengamat pendidikan; ✓ Lembaga swadaya masyarakat; ✓ Pengusaha bidang pendidikan; ✓ Pengurus yayasan,; dan ✓ Mahasiswa, siswa dan orang tua siswa.
4.	Bagaimanakah model kebijakan mewujudkan Singaraja sebagai Kota Pendidikan?	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng; ✓ Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Buleleng; ✓ Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng; ✓ Komisi IV DPRD Kabupaten Buleleng yang membidangi Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; ✓ Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Buleleng; ✓ SMA,SMK dan MA, SMP dan MTs, SD dan MI; ✓ Dosen dan guru;

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengamat pendidikan; ✓ Lembaga swadaya masyarakat; ✓ Pengusaha bidang pendidikan; ✓ Pengurus yayasan,; dan ✓ Mahasiswa, siswa dan orang tua siswa. ✓ Masyarakat Buleleng
--	---

Tabel 2.1. Masalah Penelitian dan Informan Penelitian

Pemilihan dan penentuan subjek penelitian ini dilakukan secara *purposive* (bertujuan) sesuai dengan fokus masalah dan kebutuhan penelitian. Untuk menentukan besarnya jumlah subjek penelitian, peneliti juga melakukannya secara *purposive*, dengan dasar pemikiran bahwa untuk mengembangkan model kebijakan mewujudkan Kota Singaraja sebagai Kota Pendidikan ditujukan kepada pihak-pihak dan kalangan tertentu yang bersifat khusus serta masyarakat yang memahami tentang pendidikan (Miles dan Huberman, 1992). Artinya bahwa sumber data yang dibutuhkan sesuai dengan karakteristik fokus masalah penelitian, mesti diperoleh dari mereka yang secara riil memang berkecimpung dalam bidangnya. Dengan demikian sample tidak dapat ditentukan secara kaku, melainkan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kejenuhan data penelitian.

B. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, studi dokumen, kuesioner, dan *focus group discussion*. Observasi, wawancara, kuesioner dan *focus group discussion* lebih banyak digunakan pada proses kondisi eksisting kebijakan pendidikan, kondisi pendidikan dan masalah pendidikan di Kota Singaraja, dan model kebijakan mewujudkan Singaraja sebagai Kota Pendidikan (Creswell, J. W., 2008). Sedangkan studi dokumen lebih banyak digunakan pada tahap analisis pengembangan masterplan Kota Pendidikan di Kota Singaraja. Instrumen penelitian dalam penelitian ini, menggunakan pedoman observasi, pedoman wawancara, pedoman studi dokumen, kuesioner dan pedoman *focus group discussion* yang dikembangkan sendiri oleh peneliti. Pengembangan instrumen penelitian diawali dengan perumusan konsep, pembuatan kisi-kisi, pembuatan instrumen, uji judges, uji validitas dan reliabilitas dan revisi instrumen penelitian, hingga siap digunakan (Sugiyono, 2010).

C. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif, diawali dengan

pengumpulan data, mereduksi data, menyajikan data dan dan mengklasifikasi data secara menyeluruh berdasarkan kaitan logisnya, kemudian ditafsirkan dalam keseluruhan konteks penelitian. Peneliti dalam kegiatan ini, akan berusaha memunculkan makna dari setiap data yang ada, sehingga tidak hanya bersifat deskriptif melainkan menyentuh dimensi transenden. Untuk mencapai hal itu, maka peneliti berusaha berpikir secara “*divergen yang kreatif tetapi selektif*” (Sukadi, 2000), sehingga subjektivitas pemaknaan terhadap keseluruhan data dapat di eliminir. Secara rinci langkah-langkah pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *Katagorisasi dan Kodifikasi*, pada tahap ini data yang telah terjaring akan ditulis dalam kartu data dan kemudian dikatagirisasikan dengan memberi kode-kode tertentu berdasarkan jenis dan bentuknya. Katagorisasi dan Kodifikasi data dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan interpretasi dan verifikasi data berikutnya (Miles dan Huberman, 1992).
2. *Reduksi data*, dalam tahap ini data yang telah terkumpul akan direduksi, dirangkum, dan dipilih hal-hal yang penting dan berhubungan dengan kajian penelitian. Data yang tidak berhubungan dengan kajian penelitian akan dieliminir untuk analisis data berikutnya, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan dan verifikasi data.
3. *Penyajian dan Klasifikasi Data*, untuk dapat melihat gambaran data secara menyeluruh, maka akan dilakukan klasifikasi dengan menggunakan beberapa matrik data, kemudian dideskripsikan secara rinci. Klasifikasi ini dilakukan dengan menggunakan kode yang telah digunakan pada tahap sebelumnya.
4. *Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi*, pada dasarnya dalam penelitian naturalistik pengambilan kesimpulan telah dilakukan sejak awal penelitian, namun terus dikembangkan dan diverifikasi selama berlangsungnya penelitian. Dalam verifikasi ini, peneliti berusaha mencari data baru atau memperdalam penelitian atau melakukan “*intersubjective consensus*”. Hal ini dilakukan untuk merumuskan hipotesis-hipotesis penelitian sampai terbentuknya hipotesis akhir penelitian.

Sedangkan secara kuantitatif teknik pengolahan dan analisis data akan diawali dengan pengumpulan data, uji persyaratan analisis, menghitung data dengan bantuan pemetaan untuk membuat masterplan Kota Pendidikan di Kota Singaraja (Creswell, J. W., 2008; Sugiyono, 2010).

RENCANA PENGGUNAAN PERSONIL

Berdasarkan pada kebutuhan produk yang akan dikembangkan melalui penelitian strategi kebijakan mewujudkan Kota Singaraja sebagai Kota Pendidikan kualifikasi keilmuan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Status Pegawai (ASN/Jasa Lainnya)
1.	Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.	Ketua	44	Laki-Laki	S3 Pendidikan IPS	ASN
2.	A.A. Istri Dewi Adhi Utami, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris	37	Perempuan	S2 Pendidikan IPS	ASN
3.	Dr. I Nengah Suarmanayasa, S.E., M.Si.	Anggota	42	Laki-Laki	S3 Manajemen SDM	ASN
4.	I Wayan Budiarta, S.Pd., M.Pd.	Anggota	42	Laki-Laki	S2 PPKN	ASN
5.	Made Dyah Pradnya Paramita, S.E., M.Pd.	Surveyor	49	Perempuan	S2 Pendidikan IPS	ASN
6.	Ni Nyoman Asri Sidaryanti, M.Pd.	Surveyor	37	Perempuan	S2 Pendidikan IPS	ASN
7.	Putu Mira Sari Dewi, S.E.	Surveyor	32	Perempuan	S1 Manajemen	Kontrak
8.	Ketut Adhinugraha Satya Bhakti, S.E.	Surveyor	28	Laki-Laki	S1 Manajemen	Kontrak
9.	Desak Putu Eka Trisnayanti, S.Pd.	Surveyor	38	Perempuan	S1 Pendidikan Ekonomi	Kontrak
10.	Ni Luh Nora Widari, S.E.	Tenaga Administrasi	31	Perempuan	S1 Akuntansi	Kontrak

RENCANA JADWAL PELAKSANAAN

A. Rencana Kegiatan

Kegiatan ini akan diawali dengan penyiapan administrasi pelaksana kegiatan, seperti penyiapan personil pelaksana kegiatan, pembuatan proposal penelitian, pembuatan rancangan anggaran biaya kegiatan dan negosiasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kerangka acuan kerja yang dibuat oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng. Kegiatan berikutnya adalah pengembangan instrumen penelitian dan uji validitas serta reliabilitas instrumen penelitian. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan data dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Untuk itu, kegiatan akan melibatkan dua orang akademisi sebagai judge instrumen penelitian yang dikembangkan. Kegiatan berikutnya adalah melaksanakan pengambilan data di lapangan yang dilakukan dengan metode studi pustaka, observasi, wawancara dan *focus group discusstion*. Studi pustakan dilakukan untuk menggali secara teoretik akademik bertalian dengan konsep model kota pendidikan dan stratgei mewujudkan Kota Singaraja sebagai Kota Pendidikan. Observasi dilakukan untuk mengkaji mengenai kondisi empirik eksisting pendidikan di Kota Singaraja dan masalah-msalah institusi pendidikan yang ada di Kota Singaraja dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini sampai jenjang perguruan tinggi. Kegiatan wawancara dilakukan untuk mengungkap secara konseptual empirik mengenai kondisi eksisting pendidikan, masalah-masalah pendidikan, konsep model kota pendidikan dan strategi kebijakan mewujudkan Kota Singaraja sebagai Kota Pendidikan. Sedangkan kegiatan *focus group discusstion* dilakukan untuk menjaring pandangan dan pendapat pemangku kebijakan terhadap konsep model kota pendidikan yang akan dikembangkan dan kebijakan yang akan diabil untuk mewujudkan Kota Singaraja sebagai Kota Pendidikan. Kegiatan berikutnya adalah analisis data penelitian yang dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan data yang diperoleh. Analisis data kualitatif didahului dengan pengumpulan data, memilah dan memilih data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara sirkuler. Sedangkan analisis data secara kuantitatif akan dilakukan melalui pengumpulan data, uji normalitas, uji homogenitas data dan analisi data secara stantistik untuk mendapatkan kesimpulan yang relevan. Kegiatan terakhir adalah pembuatan laporan penelitian, pembuatan ringkasan eksekutif, dan pembuatan naskah artikel ilmiah yang siap dipublikasikan pada jurnal nasional yang dikelola oleh Badan Penelitian, Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

B. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai dengan masalah penelitian pengembangan model kebijakan mewujudkan Singaraja sebagai Kota Pendidikan, maka lokasi penelitian ini adalah Kota Singaraja yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Kelurahan yaitu Astina, Banjar Bali, Banjar Jawa, Banjar Tegal, Banyuasri, Banyuning, Beratan, Kaliuntu, Kampung Anyar, Kampung Baru, Kampung Bugis, Kampung Kajanan, Kampung Singaraja, Kendran, Liligundi, Paket Agung, dan Penarukan dan 12 (dua belas) Desa, yaitu Alasangka, Anturan, Bakti Seraga, Jinengdalem, Kalibukbuk, Nagasepaha, Pamaron, Penglatan, Petandakan, Poh Bergong, Sari Mekar, Tukadmungga. Pemilihan dan penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara *purposive* (bertujuan) sesuai dengan fokus masalah dan kebutuhan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan kalender mulai tanggal 01 Juni 2024 sampai 30 Oktober 2024. Secara umum pelaksanaan kegiatan penelitian tersusun seperti jadwal berikut:

No	Tahap Kegiatan	Tahun 2024																		
		Bln 1 (Jun)			Bln 2 (Jul)			Bln 3 (Ags)			Bln 4 (Spt)			Bln 5 (Okt)						
1	Persiapan Administrasi dan Teknis Pekerjaan (penyusunan dan Penyempurnaan TOR/KAK)	x																		
2	Penyusunan Desain Penelitian/ Instrumen Survy	x	x	x																
3	Sidang TPM (Pembahasan Laporan Pendahuluan)			x																
4	Penyiapan Perangkat Susrvy			x	x															
5	Pengumpulan Data					x	x	x	x	x	x									
6	Pengolahan dan Analisi Data										x	x	x	x	x					
7	Forum Diskusi (FGD Laporan Antara)														x					
8	Penyusunan Draf Laporan Akhir										x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9	Sidang TPM Pembahasan Laporan Akhir																			x
10	Pelaporan Akhir																			x

Tabel 1.1. Tabel Jadwal Kegiatan Penelitian

MITIGASI RESIKO, MONITORING DAN EVALUASI

A. Identifikasi dan Penanganan Resiko

Pengembangan kota pendidikan membutuhkan *good will* dari pimpinan daerah dan dukungan dari semua masyarakat Kabupaten Buleleng. Bertalian dengan itu, kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dan pemikiran serta pandangan dari tokoh-tokoh masyarakat yang bergelut dalam kegiatan pendidikan sangat urgen dibutuhkan. Kebijakan dan pemikiran bersama ini akan menjadi pendorong untuk memastikan piranti-piranti untuk mewujudkan Kota Singaraja sebagai Kota Pendidikan semakin matang serta semakin dengan dengan pencapaian tujuan menjadikan Kota Singaraja sebagai Kota Pendidikan. Ada beberapa persoalan yang dinilai akan menjadi faktor penghambat pelaksanaan penelitian dalam mencapai produk yang direncanakan, yaitu: (1) keterbatasan waktu informan penelitian, khususnya pengurus institusi pendidikan yang memiliki waktu yang sangat terbatas, dan (2) keterbatasan waktu yang dimiliki peserta *focus group discussion*, khususnya pejabat pengambil kebijakan. Memastikan bahwa kegiatan akan dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan produk yang akan dihasilkan peneliti melakukan proses mitigasi. Mitigasi pada konteks ini merupakan suatu tindakan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari berbagai peristiwa atau perubahan, terutama yang terkait dengan pencapaian tujuan penelitian. Beberapa mitigasi yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu: (1) sebelum dilakukan proses wawancara kepada informan, peneliti akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai maksud dan tujuan penelitian lewat media elektronik. Proses komunikasi lewat media elektronik dinilai mampu lebih fleksibel sesuai dengan waktu yang dimiliki informan; (2) pengambilan data melalui proses wawancara akan dilakukan dengan cara menyesuaikan dengan waktu yang dimiliki oleh informan yang telah disepakati melalui proses komunikasi lewat media elektronik, (3) proses pengambilan data, selain dilakukan secara langsung juga akan dilakukan dengan cara tidak langsung dengan menyebarkan kuesioner dengan bentuk *google forms*, sehingga mudah untuk diisi dan pengisinya dapat disesuaikan dengan waktu yang dimiliki informan, (4) sebelum kegiatan *focus group discussion* semua informan diberikan *google forms* yang berisi jadwal yang paling tepat untuk melaksanakan kegiatan *focus group discussion*, sehingga dapat diketahui jadwal yang paling baik untuk kegiatan *focus group discussion*, dan (5) pelaksanaan kegiatan *focus group discussion* dilakukan pada tempat yang mudah untuk dijangkau oleh semua informan.

B. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan penelitian ini dilakukan atas kerjasama antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pendidikan Ganesha dengan Badan Penelitian, Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng. Bertalian dengan itu, maka secara yuridis akademik pertanggungjawabannya akan dilakukan secara bersama-sama. Untuk memastikan kegiatan yang dirancang akan dapat terlaksana dengan baik, monitoring dan evaluasi akan dilakukan pada tiga aspek, yaitu: (1) aspek administrasi, (2) aspek teknis pengambilan data di lapangan, dan (3) laporan dan produk kegiatan penelitian. Pada aspek administrasi kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Badan Penelitian, Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dengan menggunakan kerangka acuan kerja sebagai standar pemenuhan. Proses-proses monitoring dan evaluasi pada kegiatan ini difokuskan pada kelengkapan dan kesesuaian personal pelaksana kegiatan dengan kebutuhan pada kerangka acuan kerja, formal proposal penelitian sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional, pengajuan anggaran biaya kegiatan penelitian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan dan tapan-tahapan kegiatan yang sesuai dengan kerangka acuan kerja. Aspek teknis pengambilan data dilapangan dimonitoring dan dievaluasi oleh Badan Penelitian, Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dengan mengobservasi langsung saat kegiatan pengambilan data. Proses ini didahului dengan pengajuan surat permohonan pengambilan data pada Badan Penelitian, Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng yang dilanjutkan dengan ijin pengambilan data dan monitoring oleh pegawai Badan Penelitian, Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng. Sedangkan monitoring dan evaluasi pelaporan dan produk penelitian dilakukan melalui proses penyajian proposal pada Badan Penelitian, Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng sebagai pengguna produk penelitian, penyajian laporan pendahuluan pada Tim Pengendali Mutu, Badan Penelitian, Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng sebagai pengguna produk penelitian, institusi pendidikan mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini sampai jenjang Perguruan Tinggi, orang tua siswa/mahasiswa, pengamat pendidikan, siswa dan mahasiswa, pelaksanaan kegiatan *focus group discussion* dengan mengundang Badan Penelitian, Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng sebagai pengguna produk penelitian, institusi pendidikan mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini sampai jenjang Perguruan Tinggi, orang tua siswa/mahasiswa, pengamat pendidikan,

siswa dan mahasiswa dan penyajian laporan akhir Tim Pengendali Mutu, Badan Penelitian, Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng sebagai pengguna produk penelitian, institusi pendidikan mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini sampai jenjang Perguruan Tinggi, orang tua siswa/mahasiswa, pengamat pendidikan, siswa dan mahasiswa.

PELAPORAN

Pelaporan kegiatan akan dilakukan sesuai dengan kesempatan yang telah dicadrakan dalam kerangka acuan kerja. Pelaporan kegiatan dilakukan melalui laporan pendahuluan dan laporan akhir dengan melengkapi dengan ringkasan eksekutif dan naskah jurnal ilmiah. Sedangkan untuk pelaporan penggunaan biaya atau laporan keuangan dilakukan dengan mekanisme surat pertanggungjawaban yang memuat secara lengkap penggunaan keuangan dalam kegiatan penelitian yang dilakukan.

PENUTUPAN

Proposal kegiatan ini memuat secara detail mengenai tahapan kegiatan penelitian yang akan dilakukan selama 5 (lima) bulan kedepan. Proposal ini juga menjadi pedoman bersama untuk memastikan kegiatan penelitian dilaksanakan dengan baik untuk mencapai produk yang diharapkan. Bertalian dengan itu, saran dan kritik dari semua pihak untuk kesempurnaan proposal ini sangat tim pelaksana harapkan.

Lampiran 01. Rencana Anggaran Biaya

Rencana Anggaran Biaya

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan Sudah Termasuk Pajak (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	BIAYA PERSONIL				92,500,000
	Tenaga Ahli Penelitian Kelitbangan (Spesifikasi : Ketua)	Orang/Bulan	5	6,000,000	30,000,000
	Tenaga Ahli Penelitian Kelitbangan (Spesifikasi : Sekretaris)	Orang/Bulan	5	4,000,000	20,000,000
	Tenaga Ahli Penelitian Kelitbangan (Spesifikasi : Anggota)	Orang/Bulan	10	3,000,000	30,000,000
	Jasa Tenaga Ahli (Spesifikasi : Administrasi Minimal D3/S1)	Orang/Bulan	2	2,500,000	5,000,000
	Uang Jasa pada Kegiatan yang tidak tergabung dalam Tim/Panitia (Spesifikasi: Kegiatan Non Fisik/Surveyor)	Orang/Hari	50	150,000	7,500,000
2	BIAYA KEGIATAN				14,400,000
	Konsumsi Kegiatan / Rapat				
	Nasi Kotak (Spesifikasi : Lauk Pauk, Sayur, Buah, Air Mineral 330 Ml)	Kotak	300	33,000	9,900,000
	Snack Kotak (Spesifikasi : Kue, Permen, Air Mineral 220 Ml)	Kotak	300	15,000	4,500,000
3	PEMBUATAN LAPORAN				1,500,000
	Cetak Jilid Kajian/ Penelitian (Spesifikasi : Cetak Jilid Kertas A4 70 GSM, Jilid Hard Paper (karbon tebal di lapiasi kertas linen) ketebalan > 1-3 cm	Buku	10	150,000	1,500,000

4	BIAYA ADMINISTRASI				4,525,000
	Alat Tulis Kantor (ATK)				
	Kertas HVS (Spesifikasi : A4 70 gr)	Rim	20	57,000	1,140,000
	Kertas HVS (Spesifikasi : Folio/F4 70 gr)	Rim	20	64,000	1,280,000
	Ballpoint (Spesifikasi ukuran mata pena 0,5 mm)	Buah	15	5,000	75,000
	Map Kertas/Stopmap Folio (Spesifikasi : Folio)	Buah	25	1,200	30,000
	Tinta Printer (Spesifikasi : Epson)	Buah	8	135,000	1,080,000
	Foto Copy (Spesifikasi : Ukuran Kertas F4 70 gr)	Lembar	4,000	230	920,000
	Total Biaya				112,925,000

Lampiran 02. Daftar Pustaka

Daftar Pustaka

- Creswell, J. W. (2008). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*. Pearson.
- Dantes. (2004). *Singaraja Sebagai Kota Pendidikan*. (makalah) Disampaikan pada Sepekan civics generation I Jurusan PPKn FPIPS IKIP Negeri Singaraja.
- Djalal, Faisal. (2004) *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional – Konvensi Pendidikan Nasional – LP3ES – Rosda Karya.
- Hasan, Hamid. (1996). *Inovasi dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PPS IKIP Bandung.
- Lasmawan, W. (2003). *Analisis Strategi Kebijakan dan Standarisasi Mutu Pendidikan di Era Desentralisasi*. (Makalah) Disajikan Pada Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Bangli. IKIP Negeri Singaraja.
- Lasmawan, W. (2006). *Pemberdayaan Pengelolaan Pendidikan Pada Level Sekolah dalam Kerangka Otonomi Pendidikan*. (Makalah) Disampaikan Pada Seminar Nasional Jurusan PPKn. IKIP Negeri Singaraja.
- Mukhsin, M. (2019). Strategi Peningkatan Mutu di Era Otonomi Pendidikan. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 4(5).
- Maftuhin, A. (2017). Mendefinisikan kota inklusif: Asal-usul, teori dan indikator. *Tata Loka*, 19(2), 93-103.
- Miles dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. (Tjejep Rohendi Rohidi Penerjemah). Jakarta : UI Press.
- Mendiknas. (2001). *Problematika Pendidikan di Era Otonomi Daerah*. (Makalah) Disampaikan dalam Seminar di UNESA.
- Munir, M. (2017). *Pengetahuan dan sikap remaja tentang risiko merokok pada santri mahasiswa di Asrama Uin Sunan Ampel Surabaya* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).Pageh, Made. (1999). *Dampak Pendidikan Terhadap Mobilitas Sosial di Bali Utara Pada Zaman Belanda Awal Abad XX*. (Laporan penelitian) : IKIP Negeri Singaraja.
- Nuryanta, N. (2008). Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Tinjauan Aspek Rekrutmen dan Seleksi). *EL TARBAWI*, 1(1), 55-69.
- Nasution, E. (2016). Problematika pendidikan di Indonesia. *Mediasi*, 8(1).
- Setyaningsih, K. (2017). Esensi Transformasi Sistem Sentralisasi-Desentralisasi Pendidikan Dalam Pembangunan Masyarakat. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 76-94.
- Suti, M. (2011). Strategi peningkatan mutu di era otonomi pendidikan. *Jurnal Medtek*, 3(2), 1-6.
- Spradley, J. (1980). *Participant Observation*. Holt, Rinehart and Winston.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Soekamto. (1988). *Perubahan Masyarakat dan Dinamika Budaya Perkotaan*. Jakarta: PT. Graffiti.
- Tilaar. (2002). *Agenda Reformasi Pendidikan Nasional*. Bandung : PT. Rosdakarya.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dengan Daerah
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.